PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022

KECAMATAN MUARA BADAK

Jl. Gas Alam RT.02 No. 06 Desa Batu-Batu
Telp : 0813 5189 9383
Email : muarabadak@mail.kukarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Muara Badak Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Muara Badak Semoga LKjIP Kecamatan Muara Badak ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Muara Badak, Februari 2023
Camat Muara Badak

ARPAN,S.Sos
Nip. 196806121988031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022		PROSENTASE
				TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
		Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71	100	140.85
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95	26.28	27.66

		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	60	100
		Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai	80	70.96	88.70
2.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42	40	60.50
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	96.87	96.87
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	80	61.5	76.88
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100
	Membuat inovasi dan/atau	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100

	diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.					
	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100
	TOTAL				93.34	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	5
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	6
	E. Sumber Daya Aparatur	6
	F. Sumber Daya Keuangan	8
	G. Isu-Isu Strategis	8
	H. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	11
	A. Perencanaan Kinerja	11
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	11
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	14
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
	B. Perjanjian Kinerja	20
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2022	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	29
	A. Pengukuran Kinerja	29
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	34
	1 Analisis Kinerja Sasaran 1	34
	2 Analisis Kinerja Sasaran 2	39
	3 Analisis Kinerja Sasaran 3	48

	4	Analisis Kinerja Sasaran 4	49
	5	Analisis Kinerja Sasaran 5	50
	6	Analisis Kinerja Sasaran 6	52
	C.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	56
	D.	Realisasi Anggaran	58
BAB IV	**PENUTUP**		65
	LAMPIRAN		70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan Kecamatan Muara Badak ……...	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Badak Tahun 2022	4
Tabel 1.3	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Badak …….	5
Tabel 1.4	PNS berdasarkan Pendidikan	7
Tabel 1.5	PNS berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.6	PNS berdasarkan Eselon	7
Tabel 1.7	PNS berdasarkan Jabatan	8
Tabel 1.8	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	12
Tabel 1.9	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara BadakTahun 2021-2026……..	13
Tabel 2.0	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara badak	14
Tabel 2.1	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2022…….....	22
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 ……..	22
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2022…….	22
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2022……	23
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022…….	23
Tabel 2.7	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara BadakTahun 2022…	31
Tabel 2.8	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti……	34
Tabel 2.9	Realisasi Indikator Sasaran Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2022.	35
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum…….	35
Tabel 3.11	Realisasi Indikator Sasaran Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022……	36

Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja dengan indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	36
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Tahun 2022	37
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja dengan indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan …….	37
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Tahun 2022……	38
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja dengan indikator Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah…….	39
Tabel 3.17	Realisasi Indikator Sasaran Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah Tahun 2022……	39
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja…….	40
Tabel 3.19	Realisasi Indikator Sasaran Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja Tahun 2022……..	40
Tabel 3.20	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran……..	41
Tabel 3.21	Realisasi Indikator Sasaran Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran……..	41
Tabel 3.22	Pengukuran Kinerja dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah……..	42
Tabel 3.23	Realisasi Indikator Sasaran Pengamanan Bidang Tanah……	42
Tabel 3.24	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)……	43
Tabel 3.25	Realisasi Indikator Sasaran Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)……	44
Tabel 3.26	Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022……..	45
Tabel 3.27	Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022……..	45
Tabel 3.28	Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal	46

	31 Maret 2022……..	
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022……	46
Tabel 3.30	Pengukuran Kinerja dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah……..	47
Tabel 3.31	Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah……..	47
Tabel 3.32	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar……..	48
Tabel 3.33	Realisasi Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar…….	48
Tabel 3.34	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah……	49
Tabel 3.35	Realisasi Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah……..	49
Tabel 3.36	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya……..	50
Tabel 3.37	Realisasi Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya……..	51
Tabel 3.38	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang…….	52
Tabel 3.39	Program dan Anggaran Sasaran Tahun 2022……...	52
Tabel 3.40	Program dan Anggaran Sasaran Tahun 2022……..	53
Tabel 3.41	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021……..	54
Tabel 3.42	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022……	57
Tabel 3.43	Realisasi Anggaran Tahun 2022……..	58
Tabel 4.1	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2022……	65
Tabel 4.2	Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022……	68

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Muara Badak dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

(1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026;
(2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Badak Tahun 2022;
(3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2022; dan
(4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Muara Badak Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Badak
2. Mendorong Kecamatan Muara Badak di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Badak untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan

Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kecamatan Muara Badak masuk dalam Zona Pesisir yang terletak diantara 115°26'28" Bujur Timur/Longitude East 117°36'43" Bujur Timur/Longitude East 1°28'21" Lintang Utara/Latitude North 1°08' 06" Lintang Selatan/Latitude South. Kecamatan Muara Badak secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara: Kecamatan Marangkayu Sebelah Timur: Selat Makasar Sebelah Selatan: Kecamatan Anggana dan Kota Madya Samarinda Sebelah Barat: Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kota Madya Samarinda

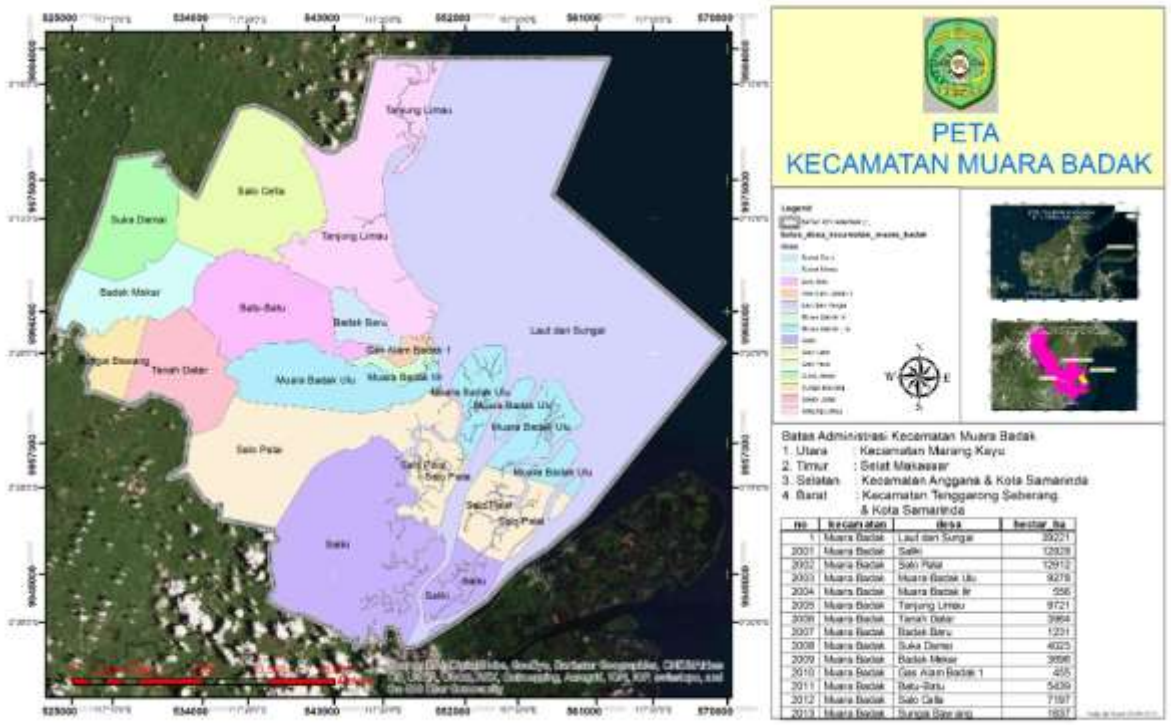

Luas Kecamatan Muara Badak 63.425 Ha, Secara administratif Kecamatan Muara Badak terdiri atas 13 Desa

Dengan luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Badak sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Badak

No	Nama Desa	Luas Wilayah Desa (Ha)	Jumlah RT	Dusun
1	Saliki	12.928	10	2
2	Salo Palai	12.912	9	2
3	Muaara Badak Ulu	10.212	14	2
4	Muara Badak Ilir	556	14	1

5	Tanjung Limau	9.721	17	2
6	Badak Baru	1.231	30	2
7	Tanah Datar	3.964	13	2
8	Badak Mekar	3.362	11	2
9	Suka Damai	4.023	11	2
10	Gas Alam Badak I	455	28	2
11	Batu Batu	5.439	6	1
12	Sungai Bawang	1.637	5	-
13	Salo Cella	7.197	12	3
TOTAL		**63.425**	**180**	**23**

Sumber Data: Pemerintahan Kecamatan Muara Badak

Jumlah penduduk mencapai 47.957 jiwa (data Bagian Pemerintahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2022),

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Badak Tahun 2022

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Saliki	3.053	2.107	5.164
2	Salo Palai	1.047	928	1.975
3	Muaara Badak Ulu	2.577	2.497	5.074
4	Muara Badak Ilir	3.074	2.123	5.197
5	Tanjung Limau	2.308	2.486	4.794
6	Badak Baru	4.509	4.470	8.979
7	Tanah Datar	1.470	1.314	2.784
8	Badak Mekar	738	632	1.370
9	Suka Damai	809	694	1.503
10	Gas Alam Badak I	2.841	2.604	5.455
11	Batu Batu	1.044	827	1.871
12	Sungai Bawang	754	891	1.645
13	Salo Cella	1.096	1.060	2.156
JUMLAH		**25.320**	**22.633**	**47.957**

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Kecamatan Muara Badak

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

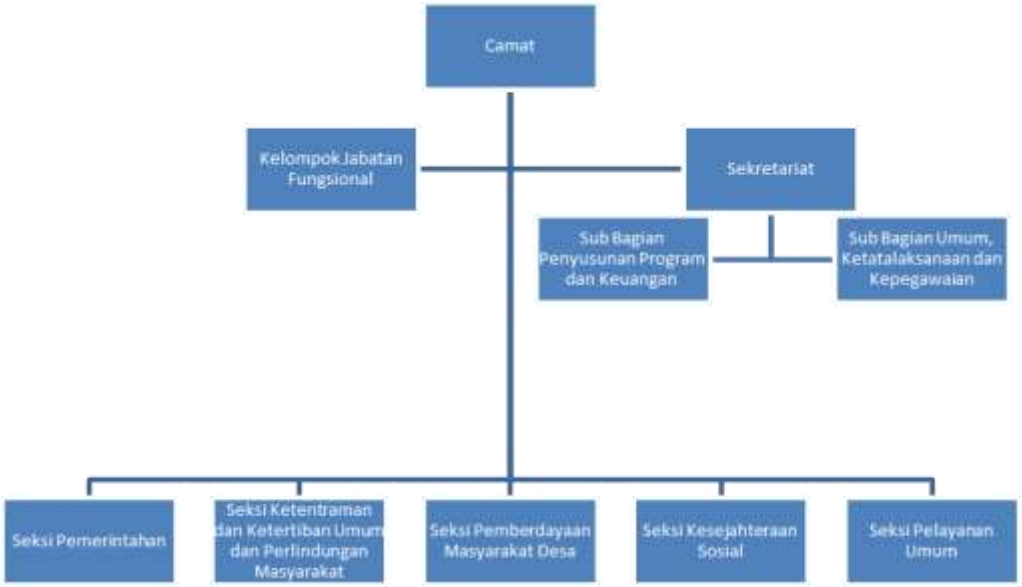

Pembentukan Kecamatan Muara Badak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
   a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;

6. Seksi Pelayanan Umum;

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2022 sebanyak 25 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.4. PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SLTA	6	5	11	44 %
2	D-III	1	0	1	4 %
3	S1	6	5	11	44 %
4	S2	0	2	2	8 %
Jumlah		**13**	**12**	**25**	**100 %**

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.5. PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II	6	4	10	40 %
2	III	6	6	12	48 %
3	IV	1	2	3	12 %
	Jumlah	14	12	25	100 %

c. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.6. PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0.00%
2	II.b	0	0	0	0.00%
3	III.a	0	0	0	0.00%
4	III.b	1	0	1	11.11%
5	IV.a	0	1	1	11.11%
6	IV.b	3	4	7	77.78%
Jumlah		4	5	9	**100%**

d. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.7. PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi

1	Struktural	4	5	9	36.00%
2	Pelaksana	9	7	16	64.00%
Jumlah		13	12	25	**100%**

F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak pada Tahun 2022 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Muara Badak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.082.481.155 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 35 (Tiga lima) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 -2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, 7 (tujuh) Isu strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Dukungan persiapan pembangunan IKN
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik, cepat, mudahm murah dan bermutu
3. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Optimalisasi potensi ekonomi daerah
5. Penataan infrastruktur daerah yang terintegrasi antara spasial dan fungsional
6. Pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan

7. Percepatan pembangunan wilayah desa dan kecamatan

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Pemerintah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkkan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
4. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan layanan umum
5. Meningkatkkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Muara Badak yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Muara Badak telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, Renstra perubahan ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”.**

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;

5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Kecamatan Muara Badak mengampu **Misi pertama** yang terlihat pada tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Insikator Sasaran
1.	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan
					Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Muara Badak berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja;
b. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indikator Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB);
c. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah dengan indikator Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Badak dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

b. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Badak, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut:

Tabel 1.9. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara BadakTahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan	Persen	60	65	70	75	80	90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		kecamatan	kecamatan yang ditindaklanjuti							
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	90	92	95	97	99	100
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	68	74	82	89	95
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persen	63	65	71	74	78	80

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.0 berikut:

Tabel 2.0 . Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Badak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan di Kecamatan
			Meningkatkan Fasilitas Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah.
			Meningkatkan Kualitas Pembangunan Jalan, Jembatan dan pemeliharaan Jalan, Jembatan di

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Kecamatan.
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	**Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Desa	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara BadakTahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100
		2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60
		5	Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai	80
2.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		2	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		3	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42
		4	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		5	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		6	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		7	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	80
4.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
5.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	1	Jumlah Inovasi	Jumlah	1

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
6.	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	1	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2
7.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	1	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

C. Alokasi Anggaran Tahun 2022

Pada tahun Anggaran 2022, Kecamatan Muara Badak melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.19.082.481.155.- Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2022 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar ***Rp. 3.319.565.067.-***

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2022

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah
Alokasi Anggaran	Rp. 15.762.916.088.-	Rp. 19.082.481.155.-	Rp. 3.319.565.967.-

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2022

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp. 15.728.000.008.-	Rp. 18.378.850.102.-	Rp. 2.650.850.094.-
Belanja Modal	Rp. 34.916.000.-	Rp. 703.631.053.-	Rp. 668.715.053.-
Total	Rp. 15.762.916.008.-	Rp. 19.082.481.155.-	Rp. 3.319.565.147.-

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2021, Kecamatan Muara Badak mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Rp 15.762.916.088	Rp. 19.082.481.155	(Rp. 523.309.902)
Total	**Rp. 15.762.916.088**	**Rp. 19.082.481.155**	**Rp 3.319.565.067**

1. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 merencanakan 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) kegiatan, dan 35 (Tiga puluh lima) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2. 6. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5,848,551,291**	**5,775,904,359**	**- 523,309,902**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**174,790,000**	**224,790,000**	**50,000,000**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,000,000	15,000,000	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,000,000	40,000,000	25,000,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,520,000	9,520,000	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,270,000	35,270,000	25,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000	100,000,000	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3,739,957,534**	**3,413,692,601**	**- 326,264,933**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,640,623,034	3,285,188,101	- 355,434,933
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,184,500	25,184,500	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74,150,000	103,320,000	29,170,000

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**65,761,100**	**65,761,100**	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24,961,100	24,961,100	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,800,000	40,800,000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**29,092,500**	**29,092,500**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29,092,500	29,092,500	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**464,486,000**	**479,804,808**	**15,318,808**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	10,000,000	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	20,000,000	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,289,000	97,289,000	-
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,000,000	30,000,000	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32,469,000	32,469,000	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224,728,000	224,728,000	-
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,000,000	65,318,808	15,318,808
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**450,662,970**	**450,662,970**
1	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau**		450,662,970	450,662,970

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Bangunan Lainnya			
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**820,084,577**	**603,571,700**	**- 216,512,877**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,989,000	1,989,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535,707,209	318,970,000	- 216,737,209
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,568,000	12,568,000	-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269,820,368	270,044,700	224,332
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**554,379,580**	**508,528,680**	**- 45,850,900**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	382,656,900	336,806,000	- 45,850,900
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,560,000	49,560,000	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122,162,680	122,162,680	-
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**9,370,207,047**	**12,649,497,046**	**3,279,289,999**
I	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**9,370,207,047**	**12,649,497,046**	**3,279,289,999**
1	Pelaksanaan Urusan			-

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30,400,000	30,400,000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9,339,807,047	12,619,097,046	3,279,289,999
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**480,600,000**	**593,522,000**	**- 66,150,000**
I	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**480,600,000**	**593,522,000**	**- 66,150,000**
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	75,000,000	75,000,000	-
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	72,600,000	39,525,000	- 33,075,000
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	333,000,000	478,997,000	- 33,075,000
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**19,754,000**	**19,754,000**	
I	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**19,754,000**	**19,754,000**	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	19,754,000	19,754,000	-

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
E	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**43,803,750**	**43,803,750**	**-**
I	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**43,803,750**	**43,803,750**	-
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22,811,250	**43,803,750**	**-**
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20,992,500	20,992,500	**-**
	Total	**15.762.916.088**	**19.082.481.155**	**3.319.565.067**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai

berikut:

$$Persentase\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Capaian = 1 + \frac{Target - Realisasi}{Target} X\ 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal.** Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta

mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Muara Badak atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2022 yang terdiri dari 15 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara BadakTahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
		2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71	100	140.85%	SANGAT BERHASIL
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95	26.28	27.66	KURANG BERHASIL
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	60	100%	SANGAT BERHASIL
		5	Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai	80	70.96	88.70%	BERHASIL
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL

		2	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		3	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42	40	60.50	CUKUP BERHASIL
		4	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	96.87	96.87%	SANGAT BERHASIL
		5	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		6	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		7	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	80	61.5	76.88%	CUKUP BERHASIL
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL

4	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	1	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100.00%	SANGAT BERHASIL
5	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	1	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100.00%	SANGAT BERHASIL
6	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	1	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
							94.34 %	**BERHASIL**

Berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 Kecamatan Muara Badak memiliki 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2022 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2022, Kecamatan Muara Badak memiliki 6 (Enam) sasaran dan 15 (Lima belas) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 Indikator, atau 80%;
b) Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 6.67%;
c) Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 6.67%; dan

d) Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 6.67%.

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “ Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan”

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan** diukur dengan 5 (Lima) indikator yaitu sebagai berikut:

1.1 Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti

Rumusan dari indikator **Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti dibagi Total keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan x 100

Tabel 2.9. Realisasi Indikator Sasaran Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2022.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan .	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti** tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indikator ini tidak ada yang ditindaklanjuti karena tidak keluhan masyarakat yang masuk

1.2 Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Rumusan dari indikator **Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus yang ditangani dibagi total kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan x 100

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Sasaran Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan .	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum** tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah kinerja untuk menyelesaikan ketentraman dan ketertiban umum dengan tindak lanjut dan Kerjasama dengan pihak TNI,Polri, Tokoh Masyarakat,

1.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan" dengan indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa** mencapai **54.03 %** dan termasuk predikat **"Cukup Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja dengan indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Nilai Total PADes tahun berjalan (N) dikurangi Nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1) dikali 100

Tabel 3.13. Realisasi Indikator Sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95	51.33	54.03

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa** tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah kinerja untuk memberikan pembinaan ke pemerintahan Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, walaupun belum semua Desa memaksimalkan Padesnya terutama BUMDes, dan pemerintaha Kecamatan telah mendorong untuk menggali potensi Desa dan pendampingan pengolahan Bumdes.

1.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan" dengan indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan** mencapai **0 %** dan termasuk predikat **" Kurang Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja dengan indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan	Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (N)

	Kecamatan	Kecamatan	dikurangi Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1) dikali 100

Tabel 3.15. Realisasi Indikator Sasaran **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	60	100

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan** tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indikator ini karena Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tangga dan Perijinan Skala Kecil telah alihkan ke DPMPTSP Tenggarong berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

1.4 Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan" dengan indikator **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah** mencapai **88.70 %** dan termasuk predikat **" Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja dengan indikator **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Piagam Penghargaan Predikat Kinerja SEDANG TAHUN 2021 oleh Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 18 April 2022

Tabel 3.17. Realisasi Indikator Sasaran **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Persen	80	70.96	88.70

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah Tahun 2022** realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Piagam Penghargaan Predikat Kinerja **SEDANG** TAHUN 2021 oleh Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 18 April 2022 dan Predikat Kinerja Tahun 2022 akan dinilai di tahun 2023.

2. Analisis Kinerja Sasaran 2 : " Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** diukur dengan 7 (Tujuh) indikator yaitu sebagai berikut:

a. **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**." dengan indikator **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja** mencapai **100 %** dan termasuk predikat **" Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18. Pengukuran Kinerja dengan indikator **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Waktu Pelaksanaan Tindak lanjut pada Minggu ke-4 Bulan Mei 2022 (Lunas) dan Dokumen yang disajikan sebagai bahan tindak Lanjut adalah Instruksi Bupati Nomor : P.552/ITDA/SET.III/700/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Bukti Setor (STS) Tertanggal 31 Mei 2022

Tabel 3.19. Realisasi Indikator Sasaran **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja Tahun 2022** realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Waktu Pelaksanaan Tindak lanjut pada Minggu ke-4 Bulan Mei 2022 (Lunas) dan Dokumen yang disajikan sebagai bahan tindak Lanjut adalah Instruksi Bupati Nomor : P.552/ITDA/SET.III/700/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Bukti Setor (STS) Tertanggal 31 Mei 2022

b. Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**" dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran mencapai **100 %** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Hasil tindak lanjut perangkat daerah dalam menyampaikan perbaikan laporan hasil inventarisasi BMD tahun 2018-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.21. Realisasi Indikator Sasaran Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian

1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran Tahun 2022**

Realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Pembentukan Tim Pelaksanaan Inventarisasi BMD terkait barang rusak berat, kondisi baik dan lain-lain

c. Pengamanan Bidang Tanah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah mencapai **60.24 %** dan termasuk predikat **"Cukup Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Pengamanan Bidang Tanah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22. Pengukuran Kinerja dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pengamanan Bidang Tanah	Perhitungan dalam kertas kerja komponen pengamanan tanah oleh Bidang Aset BPKAD.

Tabel 3.23 Realisasi Indikator Sasaran Pengamanan Bidang Tanah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42	40	60.50

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data aset tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Badak mengelola 42 (empat dua) tanah bangunan

d. Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) mencapai **96.87%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Rumusan dari indikator terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Kesesuaian Anggaran Belanja SIPD Dan Isian Data RUP, per Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 12:02 Wita.

Tabel 3.25. Realisasi Indikator Sasaran Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	96.87	96.87

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)**

realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Waktu Pelaksanaan Tindak lanjut Kesesuaian Anggaran Belanja SIPD Dan Isian Data RUP, per Tanggal 30 Maret 2022 Pukul 12:02 Wita karena masih kurangnya ASN untuk input

e. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 mencapai **100%** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26. Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Report Penyampaian LHKPN dari Aplikasi e-LHKPN.

Tabel 3.27. Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	1000

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022**
realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Waktu Pelaksanaan Tindak lanjut kepatuhan ASN sangat baik

f. Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 mencapai **100 %** dan termasuk predikat **"Sangat Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28. Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.Kecamatan	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Report Penyampaian LHKASN, data kepatuhan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.29. Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022** realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Waktu Pelaksanaan Tindak lanjut kepatuhan ASN sangat baik

g. **Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan" dengan Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah mencapai **76.88 %** dan termasuk predikat **"Cukup Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.30. Pengukuran Kinerja dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Hasil Audit Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.31. Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	80	61.5	76.88

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah**
realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah adanya bimbingan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada ASN pengelola arsip di Kecamatan tentang tata kelelo arsip yang perlu adanya peningkatan

2. Analisis Kinerja Sasaran 3 : " Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data

dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar mencapai **100 %** dan termasuk predikat **" Cukup Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.32. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Report Keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar

Tabel 3.33. Realisasi Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100

Target kinerja **Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar**

realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah adanya Adanya ketaatan dalam pengisian data dalam aplikasi satu data kukar

3. Analisis Kinerja Sasaran 4 : " Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah."

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah. mencapai **100 %** dan termasuk predikat **" Cukup Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.34. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Report mengikuti 1 inovasi dalam system

Tabel 3.35. Realisasi Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan	Jumlah Inovasi	1	100	100	100

	dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah					

Target kinerja Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah adanya Adanya ketaatan dalam mengikuti 1 inovasi dalam setiap tahun

4. Analisis Kinerja Sasaran 5 : " Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.."

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.. mencapai **100 %** dan termasuk predikat **" Cukup Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.36 Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	1. Berita Acara Evaluasi 2. Evaluasi Pleno/Penetapan

	rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.		

Tabel 3.37 Realisasi Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100

Target kinerja Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.

realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Adanya ketaatan Pemerintah Desa (13) Desa untuk mendata warga dalam program DTKS yang di canangkan oleh Pemerintah Pusat

5. Analisis Kinerja Sasaran 6 : " Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang.."

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang.. mencapai **100 %** dan termasuk predikat **" Cukup Berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang.terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.38. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Aplikasi SIMDA

Tabel 3.39. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100

Target kinerja Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah adanya kerja keras ASN Kecamatan dalam melaksanakan realisasi kegiatan dalam APBD, yang kegiatan tidak meninbulkan utang

Sasaran tersebut dicapai melalui Program sebagai berikut:

Tabel 3.40. Program dan Anggaran Sasaran Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.775.904.359	5.270.635.032	91,25
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	593.522.000	567.784.500	95.66
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.649.497.046	12.585.271.000	99.49
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.754.000	19.754.000	100
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43.803.750	40.188.400	91.75
TOTAL		**19.082.481.155**	**18.483.632.932**	**96.86**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.18.483.632.932 dari anggaran sebesar Rp.19.082.481.155 atau 96.86 %. Realisasi keuangan sebesar 96.86 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 80.84 %, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berbeda dengan perjanjian kinerja tahun-tahun sebelumnya, karena selain sasaran dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam renstra perangkat daerah, juga memuat indikator tambahan. Indikator tambahan dituangkan dalam perjanjian kinerja atas permasalahan yang masih ada dan belum mendapat perhatian, sehingga dengan dimuat dalam perjanjian kinerja, diharapkan permasalahan tersebut mendapat perhatian untuk diselesaikan.

Karena indikator tambahan baru ada di Tahun 2022, sehingga tidak semua capaian kinerja tahun 2022 bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021. Berikut

Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja		Keterangan
				2021	2022	
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	0	100	0 % karena IKU Pada tahun 2021 belaum ada
		2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	140.85	0 % karena IKU Pada tahun 2021 belaum ada
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	27.66	0 % karena IKU Pada tahun 2021 belaum ada
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	0	60	0 % karena IKU Pada tahun 2021 belaum ada
		5	Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	0	88.70	Inspektorat Kab.Kukar belum melakukan Evaluasi Sakip pada tahun 2021

2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	100	100	-
		2	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	100	100	-
		3	Pengamanan Bidang Tanah	35	60.50	-
		4	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	72.99	96.87	-
		5	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	100	100	-
		6	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	95	100	-
		7	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	75	76.88	-

3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	0	100	0 % karena IKU Pada tahun 2021 belaum ada
4	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	1	Jumlah Inovasi	0	100	0 % karena IKU Pada tahun 2021 belaum ada
5	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	1	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	0	100	0 % karena IKU Pada tahun 2021 belaum ada
6	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	1	Capaian Output Kegiatan	0 73,72	100 93.34	0 % karena IKU Pada tahun 2021 belaum ada

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2022 menunjukkan angka peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021, namun semua Sasaran menunjukkan angka peningkatan walau tidak terlalu signifikan dan sebagai besar masih belum mencapai terget kinerja yang diperjanjikan di tahun 2022

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.42. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	80.70	19.082.481.155	18.483.632.932	96.86	Tidak Efesien
2.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.					
3.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah					
4.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.					
5.	Melakukan Pengendalian					

	terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.					
6.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang					

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 6 sasaran menunjukkan tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ada pada Kecamatan Muara Badak dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 96,86 %, adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.43. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan						
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti		**100**	100	100	
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa		**95**	26.28	27.66	
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan		**60**	60	100	
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		**71**	100	140.85	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5,775,904,359**	**5,270,635,032**	**91.25**	**505,269,327**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**224,790,000**	**211,481,000**	**94.08**	**13,309,000**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	100.00	-

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,000,000	15,000,000	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40,000,000	39,880,000	99.70	120,000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,520,000	9,520,000	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	35,270,000	35,135,000	99.62	135,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000	86,946,000	86.95	13,054,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3,413,692,601**	**2,978,171,575**	**87.24**	**435,521,026**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,285,188,101	2,849,667,075	86.74	435,521,026
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,184,500	25,184,500	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	103,320,000	103,320,000	100.00	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**65,761,100**	**65,665,000**	**99.85**	**96,100**

		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24,961,100	24,865,000	99.62	96,100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,800,000	40,800,000	100.00	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**29,092,500**	**23,802,500**	**81.82**	**5,290,000**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29,092,500	23,802,500	81.82	5,290,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**479,804,808**	**469,627,202**	**97.88**	**10,177,606**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	9,984,000	99.84	16,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	20,000,000	100.00	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,289,000	97,199,500	99.91	89,500
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,000,000	29,977,200	99.92	22,800
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	32,469,000	25,204,000	77.62	7,265,000

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224,728,000	224,628,002	99.96	99,998
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	65,318,808	62,634,500	95.89	2,684,308
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**450,662,970**	**444,962,000**	**98.73**	**5,700,970**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450,662,970	444,962,000.00	98.73	5,700,970
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**603,571,700**	**589,167,427**	**97.61**	**14,404,273**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,989,000	1,989,000	100.00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318,970,000	306,939,557	96.23	12,030,443
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,568,000	12,474,030	99.25	93,970
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270,044,700	267,764,840	99.16	2,279,860
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**508,528,680**	**487,758,328**	**95.92**	**20,770,352**

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	336,806,000	327,445,328	97.22	9,360,672
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,560,000	38,837,000	78.36	10,723,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122,162,680	121,476,000	99.44	686,680
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**593,522,000**	**567,784,500**	**95.66**	**25,737,500**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**593,522,000**	**567,784,500**	**95.66**	**25,737,500**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	75,000,000	54,975,000	73.30	20,025,000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	39,525,000	38,627,500	97.73	897,500
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	478,997,000	474,182,000	98.99	4,815,000

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**12,649,497,046**	**12,585,271,000**	**99.49**	**64,226,046**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**12,649,497,046**	**12,585,271,000**	**99.49**	**64,226,046**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30,400,000	28,572,000	93.99	1,828,000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,619,097,046	12,556,699,000	99.51	62,398,046
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**19,754,000**	**19,754,000**	**100.00**	**0**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**19,754,000**	**19,754,000**	**100.00**	**0**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19,754,000	19,754,000	100	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**43,803,750**	**40,188,400**	**91.75**	**3,615,350**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**43,803,750**	**40,188,400**		**3,615,350**

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22,811,250	17,377,500	76.18	5,433,750
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20,992,500	22,810,900	108.66	-1,818,400
			19,082,481,155	**18,483,632,932**	**96.86**	**598,848,223**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak tahun 2022 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Muara Badak pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima dari Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2016-2021. Kecamatan Muara Badak telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022.

Tabel 4.1. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
		2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71	100	140.85%	SANGAT BERHASIL
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95	26.28	27.66%	KURANG BERHASIL
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	60	100%	SANGAT BERHASIL
		5	Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai	80	70.96	88.70%	BERHASIL

2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		2	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		3	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42	40	60.50%	CUKUP BERHASIL
		4	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	96.87	96.87%	SANGAT BERHASIL
		5	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		6	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		7	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	80	61.5	76.88%	CUKUP BERHASIL

3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
4	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	1	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100.00%	SANGAT BERHASIL
5	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	1	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100.00%	SANGAT BERHASIL
6	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	1	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
							93.34%	BERHASIL

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 Indikator, atau 80%;
b) Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 6.67%;
c) Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 6.67%; dan
d) Capaian kinerja 0 s/d< 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 6.67%.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	**Rp. 18.378.850.102.-**	**Rp 17.787.490.932,-**	**96.78 %**
Belanja Modal	**Rp. 703.631.053.-**	**Rp. 696.142.000,-**	**98.94 %**
Total	**Rp. 19.082.481.155.-**	**Rp. 18.483.632.932.-**	**96.86 %**

Tabel 4. 2. Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi keuangan Tahun 2022 sebesar 96.86 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2022 sebesar 80.70 %, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang tidak bisa mencapai secara maksimal karena beberapa hal :

1. Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti, dengan kuesioner yang diedarkan kepada masyarakat 6.753 respondent sewaktu di Loket Paten, dan semua jenis layanan yang dijadikan Target sampling 442 respondent dimana hasilnya adalah Peningkatan Layanan Paten. Dan untuk tahun 2023 akan menindaklanjuti.

2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa dengan capaian 27.66 %, Pemerintah Kecamatan telah memberikan Pembinaan ke Pemerintah Desa dalam kegiatan Peningkatan Pengolahan BUMDES, tapi Pendapatan Asli Desa belum mencapai baik dan Target pertumbuhan dalam Renstra terlalu tinggi dan perlu ada review

3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tangga dan Perijinan Skala Kecil sebelumnya masih kewenangan Camat telah alihkan ke DPMPTSP Tenggarong berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan untuk tahun 2023 agar indicator tersebut bisa di review dengan target sasaran 0.

4. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerahdengan Nilai 61,5 Hasil Audit Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, ada peningkatan dari hasil Audit tahun 2021 dengan Nilai 49, Pemerintah Kecamatan telah melalukan pembinaan, bimbingan dari OPD Teknis ke masing Pejabat untuk tertib administarsi kearsipan dan perlu perbaikan dan peningkatan tahun berikutnya.

5. Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah dengan Nilai capaian 70,89 pada tahun 2021, disebabkan ada beberapa Indikator dengan capaian 0

6. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) dengan capaian 96,87 yang ada beberapa factor yaitu, masing rangkat jabatan yang input SIRUP karena ASN kecamatan 25 orang.

7. Pengamanan Bidang Tanah dengan nilai 35 % pada tahun 2021, ada peningkatan 60.50 pada tahun 2022, dan pemerintah Kecamatan telah mengganggarkan pengamanan BMD tapi masih beberapa factor yang mempengaruhi dan belum teramankan.

Camat Muara Badak

ARPAN,S.Sos

Nip. 196806121988031007

DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN
KECAMATAN MUARA BADAK
TAHUN 2022

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan,Waktu Penerimaan
1	2	3
1.	Piagam Penghargaan Peringkat VI Perangkat Daerah Dengan Penyelesaian Tercepat Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2021	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 13 April 2022
2.	Piagam Penghargaan Peringkat 8 Kategori Kecamatan dengan Raihan Predikat Kinerja SEDANG Evaluasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 18 April 2022
3.	Piagam Penghargaan UPZ Terbaik dalam Agenda MUZAKKI AWARD 2022	Baznas Kabupaten Kutai Kartanegara, 27 November 2022
4.	Piagam Penghargaan Terbaik Iii Nasional Lomba Wana Lestari Tahun2022 Kategori Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Kth Ramah Lingkungan Salo Sumbala)	Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. 09 Agustus 2022
5.	Piagam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 Kategori Baik	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 24 Oktober 2022
6.	Piagam Penghargaan Terhadap Kader Kesehatan (Posyandu Balita Dahlia)	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 12 November 2022
7.	Juara ke II MTQ Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Desember 2022